

BAB 1

PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dipaparkan latar belakang yang mendorong diperlukannya penelitian ini, rumusan persoalan yang diangkat, tujuan dan sasaran penelitian, ruang lingkup, manfaat, serta metodologi penelitian yang dilakukan.

1.1 Latar Belakang

Hakikat pembangunan nasional termasuk pengembangan wilayah adalah bagaimana memacu pertumbuhan wilayah dan menyebarkannya (*growth with equity*) secara lebih merata sehingga dapat mensejahterakan masyarakat yang ada didalamnya. Dalam rangka mempercepat pertumbuhan wilayah terutama pada negara berkembang seperti Indonesia, maka teori pusat pertumbuhan yang dipelopori oleh Perroux (1950), Myrdall (1957) dan Hirschman (1985) menjadi dasar dari strategi pengembangan suatu wilayah.

Menurut Perroux dalam Thomas (1972), pertumbuhan wilayah dipengaruhi oleh suatu sektor dominan yang disebut industri propulsif (*propulsive industry*) dan industri kunci (*key industry*). Industri propulsif ini dicirikan dengan adanya penggunaan teknologi yang canggih dan adanya keterkaitan kedepan dan kebelakang yang kuat. Apabila output dari industri propulsif meningkat, maka hal ini akan menginduksi industri lain yang berkaitan sehingga output industri lainnya pun naik. Apabila kenaikan ini besar, maka *propulsive industry* dapat disebut dengan *key industry* (Nurzaman, 2012). Hal ini sejalan dengan pendapat Sohr dalam Mercado (2002) bahwa pembangunan dapat dimulai hanya dalam beberapa sektor yang dinamis yang mampu memberikan output rasio yang tinggi dan pada wilayah tertentu dapat memberikan dampak yang luas (*spread effect*) dan dampak ganda (*multiple effect*) pada sektor lain dan wilayah yang lebih luas.

Teori pusat pertumbuhan didasarkan pada kepercayaan bahwa pemerintah di negara berkembang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan dengan melakukan investasi yang besar pada industri padat modal di pusat kota (Rondinelli dan Unwin dalam Mercado, 2002). Teori pusat

pertumbuhan juga ditopang oleh kepercayaan bahwa kekuatan pasar bebas melingkupi kondisi terjadinya *trickle down effect* (dampak penetesan ke bawah) dan menciptakan *spread effect* (dampak penyebaran) pertumbuhan ekonomi dari perkotaan ke pedesaan. Demikian halnya menurut Boudeville (1987) dalam Nurzaman (2012) yang menyatakan bahwa kutub pertumbuhan (*growth pole*) adalah sekumpulan kegiatan industri yang berada di daerah perkotaan yang mampu mendorong daerah sekitarnya dalam hal mengembangkan kegiatan ekonomi terutama daerah sekitar yang sumber dayanya terbatas.

Terdapat sebuah pendapat yang menyatakan bahwa *Industry is seen as the main "engine of growth"* (Kaldor, 1967). Hal ini berarti bahwa industri merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Keberadaan industri juga sering dikaitkan dengan peranan industri sebagai sektor pemimpin (*leading sector*), yaitu pembangunan industri dapat memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya seperti sektor perdagangan, pertanian, ataupun sektor jasa (Arsyad, 1999).

Adapun pengertian industri menurut UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yaitu:

"seluruh kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/ atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri"

Sedangkan menurut Dumairy (1996), industri dapat pula merujuk ke suatu sektor ekonomi yang di dalamnya terdapat kegiatan produktif yang mengolah barang jadi atau barang setengah jadi. Kegiatan pengolahan tersebut dapat bersifat masinal, elektrik atau manual. Kata lain sektor industri untuk arti yang kedua ini adalah sektor industri pengolahan (*manufacturing*) yakni sebagai salah satu sektor produksi atau lapangan usaha dalam perhitungan pendapatan nasional menurut pendekatan produksi.

Sektor industri diyakini sebagai sektor yang dapat memimpin sektor-sektor lain dalam sebuah perekonomian menuju kemajuan. Produk-produk industri selalu memiliki "dasar tukar" (*terms of trade*) yang tinggi atau lebih menguntungkan serta menciptakan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan produk-produk sektor lain. Hal ini disebabkan karena sektor industri memiliki produk yang sangat beragam dan mampu memberikan manfaat marjinal yang

tinggi kepada pemakainya seta memberikan keuntungan yang lebih menarik. Oleh sebab itu pengembangan sektor industri dianggap sebagai ‘obat mujarab’ (*panacea*) untuk mengatasi masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang (Pasaribu, 2000).

Berdasarkan uraian tersebut, maka pengembangan sektor industri menjadi dasar pertimbangan pemerintah dalam mewujudkan pertumbuhan wilayah di Indonesia. Pengembangan sektor industri menjadi salah satu program utama dalam MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi Indonesia pada periode 2011-2025. Dalam dokumen MP3E1, salah satu koridor ekonomi yang difokuskan pengembangannya pada sektor industri adalah Koridor Ekonomi Jawa dengan tema pembangunan sebagai “Pendorong Industri dan Jasa Nasional”. Berdasarkan tema pembangunan tersebut maka pembangunan ekonomi Pulau Jawa diarahkan untuk pengembangan sektor industri dan jasa.

Salah satu pusat kegiatan industri di Pulau Jawa adalah Provinsi Jawa Barat, mengingat Provinsi Jawa Barat memiliki 25 kawasan industri besar dari total lebih dari 100 kawasan industri (Bisnis.com, 2014). Lebih lanjut, salah satu wilayah di Provinsi Jawa Barat yang difokuskan pengembangannya pada sektor industri adalah Kabupaten Bekasi. Hal tersebut sesuai dengan arahan RTRW Provinsi Jawa Barat 2009-2029, bahwa Kabupaten Bekasi yang termasuk kedalam WP (Wilayah Pengembangan) Bodebekpunjur (Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kawasan Puncak dan Kabupaten Cianjur) diarahkan pengembangannya pada sektor industri. Sebagai implikasi dari kebijakan tersebut, maka sektor industri menjadi sektor ekonomi dominan Kabupaten Bekasi dan mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bekasi menyebutkan jumlah industri di Kabupaten Bekasi menunjukkan pertumbuhan yang pesat yaitu sebanyak 503 industri pada tahun 1998 dan meningkat hingga 891 industri pada tahun 2013. Sejumlah industri tersebut berlokasi di kawasan-kawasan industri yang ada di Kabupaten Bekasi. Hingga saat ini, terdapat 11 kawasan industri yang terletak di, Kabupaten Bekasi yaitu MM2100 BFIE, MM2100 MMID, EJIP (*East Jakarta Industrial Park*), Kawasan Industri Gobel, *Bekasi International Industrial*

Estate (BIIE), *Jababeka Industrial Estate-Cikarang* (JIEC), Lippo Cikarang, Marunda Center, *Patria Manunggal Industrial Estate*, GIIC (*Greenland International Industrial Center*), dan Kawasan Industri Terpadu Indonesia-China. Pembangunan kawasan industri di Kabupaten Bekasi telah dimulai sejak tahun 1990-an atau setelah adanya Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang kawasan industri. Setelah dibangunnya kawasan-kawasan industri, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bekasi menjadi semakin meningkat (Bakrie Center Foundation, 2014).

Pertumbuhan perekonomian wilayah Kabupaten Bekasi mengalami peningkatan yang pesat dari tahun ke tahun. Peningkatan yang signifikan terjadi pada sektor industri dengan laju pertumbuhan sektor industri pada tahun 2013 sebesar 5,89%, lebih tinggi dari laju pertumbuhan sektor industri Provinsi Jawa Barat yang mencapai 5,32%. Selain itu, sektor industri menjadi sektor ekonomi dominan di Kabupaten Bekasi yang ditunjukkan oleh tingginya kontribusi sektor industri terhadap PDRB. BPS Kabupaten Bekasi mencatat, sebesar 77,61% PDRB Kabupaten Bekasi tahun 2013 berasal dari sektor industri pengolahan. Selain kontribusinya yang sangat tinggi terhadap PDRB Kabupaten Bekasi, nilai tambah sektor industri pun memiliki peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun dan jauh melebihi sektor-sektor lainnya (gambar 3.11).

Pertumbuhan sektor industri tersebut berpengaruh pula terhadap tingginya pendapatan perkapita Kabupaten Bekasi pada tahun 2013 yaitu Rp. 21,99 juta pada tahun 2013. Pendapatan perkapita Kabupaten Bekasi sangat tinggi apabila dibandingkan dengan pendapatan perkapita Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 8,18 Juta. Meskipun demikian, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bekasi masih cukup tinggi yaitu sebanyak 137.000 jiwa (5,97%) pada tahun 2009 dan meningkat hingga 161.000 jiwa (6,11%) pada tahun 2010. Selain itu, terdapat pula indikasi terjadinya ketimpangan antara wilayah yang dekat dengan kegiatan industri (*pusat pertumbuhan/ core region*) dengan wilayah belakangnya (*pheriphery*).

Uraian tersebut menunjukkan bahwa terdapat indikasi bahwa pertumbuhan sektor industri ini belum sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi. Padahal, apabila mengacu pada UU No. 3 Tahun 2014 tentang

perindustrian, salah satu tujuan pembangunan industri adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, maka kajian mengenai dampak pertumbuhan industri terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bekasi menjadi penting untuk dilakukan.

1.2 Rumusan Masalah

Kabupaten Bekasi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan sektor industri sebagai sektor ekonomi dominan. Hal ini terlihat pada tingginya kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Bekasi dan mayoritas penduduk yang bekerja pada sektor Industri. Data BPS menyebutkan bahwa sebesar 77,61% PDRB Kabupaten Bekasi tahun 2013 berasal dari sektor industri. Selain itu berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Barat, sebanyak 517.881 orang atau 41% penduduk (usia produktif) Kabupaten Bekasi bekerja di sektor industri pada tahun 2013.

Kegiatan industri di Kabupaten Bekasi sudah dimulai semenjak tahun 1990an atau setelah disahkannya UU No. 5 tahun 1984 tentang perindustrian dan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri. Kegiatan industri tumbuh di Kabupaten Bekasi sebagai limpahan kegiatan industri di Metropolitan Jakarta. Hal ini terjadi mengingat aktivitas industri sudah tidak tertampung lagi di kota utama (Kawasan Metropolitan Jakarta) sehingga berkembang ke kawasan pinggiran (Viantari, 2014). Dengan lokasinya yang sangat strategis, Kabupaten Bekasi sebagai kawasan pinggiran Metropolitan Jakarta sangat berpotensi untuk pengembangan kegiatan industri. Hal ini didukung oleh pendapat Maryonoputri (2010) yang menyatakan bahwa kawasan pinggiran menjadi alternatif tujuan pemilihan lokasi bagi kegiatan industri yang merupakan limpahan dari kota inti.

Dalam perkembangannya, hingga saat ini sudah terdapat 11 kawasan industri yang terletak di Kabupaten Bekasi yaitu MM2100 BFIE, MM2100 MMID, EJIP (*East Jakarta Industrial Park*), Kawasan Industri Gobel, *Bekasi International Industrial Estate* (BIIE), *Jababeka Industrial Estate-Cikarang* (JIEC), Lippo Cikarang, Marunda Center, *Patria Manunggal Industrial Estate*, GIIC (*Greenland International Industrial Center*), dan Kawasan Industri Terpadu

Indonesia-China. Kemudian dengan adanya kebijakan RTRW Provinsi Jawa Barat 2009-2029 yang menyatakan bahwa Kabupaten Bekasi termasuk kedalam WP (Wilayah Pengembangan) Bodebekpunjur (Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kawasan Puncak dan Kabupaten Cianjur) dan arahan pengembangannya difokuskan pada sektor industri, sehingga membawa implikasi terhadap pertumbuhan industri yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 1998, jumlah industri Kabupaten Bekasi berjumlah 503 dan mengalami peningkatan pada 2013 menjadi 907 industri.

Pertumbuhan industri tersebut membawa implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Bekasi. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan PDRB Kabupaten Industri terutama pada sektor industri pengolahan. Pertumbuhan sektor industri pengolahan Kabupaten Bekasi memiliki kecenderungan yang semakin meningkat dari tahun ke tahunnya. Menurut data BPS Kabupaten Bekasi, laju pertumbuhan PDRB sektor industri pada tahun 2013 adalah sebesar 5,89%. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan PDRB sektor industri Provinsi Jawa Barat tahun 2013 sebesar 5,32%.

Kebijakan pengembangan sektor industri yang telah disebutkan di atas mengacu pada teori pusat pertumbuhan yang didasarkan pada keyakinan bahwa pemerintah di negara berkembang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan dengan melakukan investasi yang besar pada industri padat modal di pusat kota (Rondinelli dan Unwin dalam Mercado, 2002). Dengan demikian jelas bahwa Industri diyakini menjadi motor penggerak pertumbuhan suatu wilayah yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, terdapat indikasi bahwa pertumbuhan sektor industri ini belum sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi. Hal ini didukung oleh fakta masih tingginya tingkat kemiskinan Kabupaten Bekasi yaitu sebesar 5,97% (137.000 jiwa) pada tahun 2009 dan meningkat hingga 6,11% (161.000 jiwa) pada tahun 2010. Selain itu, terdapat pula indikasi terjadinya ketimpangan antar wilayah pusat (*core region*) & wilayah belakang (*periphery*) yang menunjukkan belum meratanya dampak positif yang diberikan dari pertumbuhan industri tersebut. Padahal pembangunan industri sebagaimana yang

diamanatkan dalam UU No. 3 Tahun 2014 tentang perindustrian salah satunya bertujuan untuk untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Todaro (2003) mengemukakan bahwa kesejahteraan masyarakat dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat. Tingkat hidup masyarakat ditandai dengan terentaskannya masyarakat dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktivitas masyarakat. Kesejahteraan menurut Segal dan Brzuzy yang dikutip dalam Suud (2006) yaitu kondisi sejahtera dari suatu masyarakat. Kondisi sejahtera (*well-being*) biasanya menunjuk pada istilah kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan nonmaterial. Kesejahteraan sosial meliputi kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup rakyat. Lebih lanjut, pengukuran kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui ukuran-ukuran seperti tingkat kehidupan (*levels of living*), pemenuhan kebutuhan pokok (*basic needs fulfillment*), kualitas hidup (*quality of life*) dan pembangunan manusia (*human development*) (Sen, 2008). Selain itu, menurut Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (2013), terdapat beberapa indikator yang digunakan dalam mengukur kesejahteraan rakyat antara lain persentase penduduk miskin, akses terhadap infrastruktur, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja, dll. Dari beberapa indikator kesejahteraan tersebut, indikator penting yang menjadi permasalahan pelik yang dihadapi oleh suatu wilayah sekaligus menjadi fokus utama pembangunan wilayah antara lain tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan (Kemenperin, 2012), tingkat pembangunan manusia, serta akses masyarakat terhadap infrastruktur (World Bank 2007).

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian dalam studi ini adalah “***Bagaimanakah dampak pertumbuhan industri terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi?***” Pertanyaan penelitian tersebut kemudian diturunkan menjadi beberapa pertanyaan penelitian rinci, antara lain:

- Bagaimana dampak pertumbuhan industri pada tingkat pengangguran?;
- Bagaimana dampak pertumbuhan industri pada tingkat kemiskinan?;
- Bagaimana dampak pertumbuhan industri pada tingkat pembangunan manusia?; dan

- Bagaimana dampak pertumbuhan industri pada akses masyarakat terhadap infrastruktur?

1.3 Tujuan dan Sasaran

Dengan melihat latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah untuk **Mengidentifikasi dampak pertumbuhan industri terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi**. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan di atas adalah:

- Mengidentifikasi dampak pertumbuhan industri pada tingkat pengangguran
- Mengidentifikasi dampak pertumbuhan industri pada tingkat kemiskinan
- Mengidentifikasi dampak pertumbuhan industri pada tingkat pembangunan manusia
- Mengidentifikasi dampak pertumbuhan industri pada akses masyarakat terhadap infrastruktur

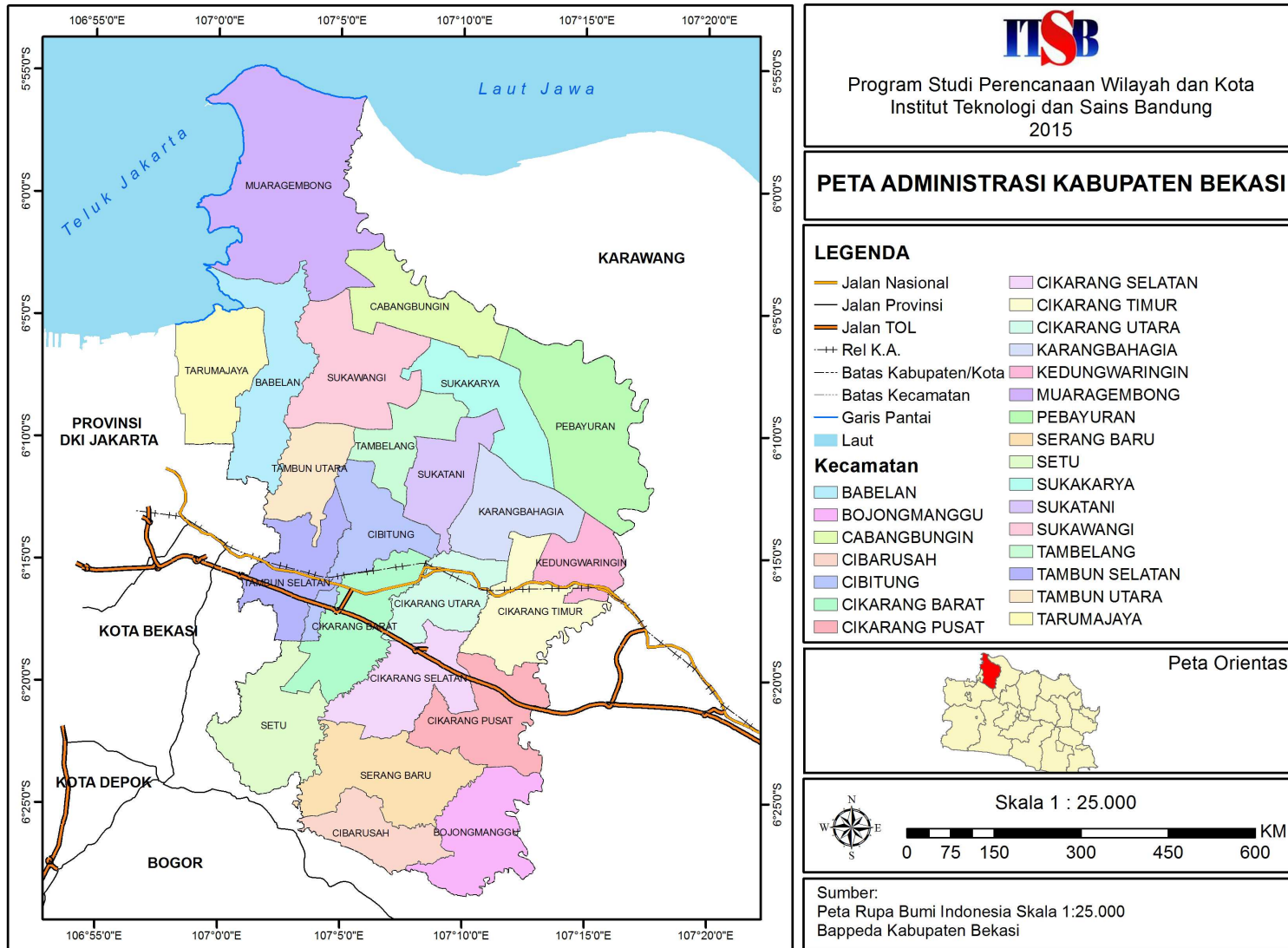
1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan penelitian dapat lebih terfokus dan tepat sasaran maka diperlukan pembatasan terhadap ruang lingkup penelitian yang dilakukan. Pembatasan ruang lingkup penelitian yang dimaksud dituangkan dalam batasan wilayah (ruang lingkup wilayah) dan batasan materi (ruang lingkup materi). Berikut ini merupakan uraian mengenai ruang lingkup wilayah yang mendeskripsikan mengenai wilayah penelitian, ruang lingkup materi yang berisikan hal-hal yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian.

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bekasi. Secara administratif, Kabupaten Bekasi terletak pada Provinsi Jawa Barat. Adapun secara geografis, Kabupaten Bekasi dibatasi oleh Laut Jawa di sebelah utara, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor, sebelah barat berbatasan dengan Kota Jakarta Utara dan Kota Bekasi, serta sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karawang. Wilayah Administrasi Kabupaten Bekasi dapat dilihat pada gambar 1.1

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Bekasi



1.4.2 Ruang Lingkup Materi

Studi ini ingin melihat dampak pertumbuhan industri terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi. Pertumbuhan Industri yang dimaksud adalah pertumbuhan industri besar atau industri manufaktur. Untuk itu maka perlu diidentifikasi terlebih dahulu indikator pertumbuhan industri untuk kemudian diasosiasikan dengan indikator kesejahteraan masyarakat. Ruang lingkup materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pertumbuhan Industri

Pertumbuhan industri dilihat berdasarkan pada kriteria yang meliputi (Kemenperin, 2015 dan Kuncoro, 2002):

- 1) Pertumbuhan jumlah industri;
- 2) Pertumbuhan nilai investasi untuk kegiatan industri;
- 3) Pertumbuhan nilai tambah, dalam hal ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri pengolahan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2000;
- 4) Pertumbuhan nilai output, yang akan dilihat dari pertumbuhan nilai ekspor; dan
- 5) Pertumbuhan tenaga kerja industri;

b. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari beberapa kriteria pada tabel 1.1 Pada studi ini, indikator kesejahteraan masyarakat yang digunakan adalah: 1) Tingkat pengangguran, 2) Tingkat kemiskinan, 3) Tingkat Pembangunan Manusia, dan 4) Akses masyarakat terhadap infrastruktur yang dimaksud meliputi akses terhadap air bersih, akses terhadap listrik, akses terhadap sarana kesehatan, dan akses terhadap sarana pendidikan. Keempat indikator ini dipilih karena beberapa alasan berikut:

- 1) Pengangguran merupakan masalah yang sangat serius dan sangat mempengaruhi kondisi perekonomian suatu wilayah, karena jumlah pengangguran merupakan indikator majunya perekonomian suatu wilayah yang dapat menunjukkan tingkat distribusi pendapatan yang merata atau tidak di wilayah tersebut;

- 2) Permasalahan pembangunan nasional yang sedang dihadapi bangsa Indonesia dan memerlukan upaya penanganan yang terstruktur dan berkelanjutan di antaranya meliputi: Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan (Kemenperin, 2012). Selain itu, merujuk kepada UU No 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, kemiskinan menjadi salah satu masalah sosial yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- 3) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dilihat dari dimensi yang jauh lebih beragam terkait dengan kualitas hidup masyarakat (Yunitasari dalam Hidayat, 2008). Oleh karena itu, IPM dapat menjadi tolok ukur kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut, semakin tinggi/baik setiap komponen penyusun IPM juga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat yang lebih baik; serta
- 4) World Bank (2007) menyebutkan bahwa salah satu faktor penentu yang penting dalam kesejahteraan masyarakat adalah akses infrastruktur. Selain itu, salah satu tujuan RPJM Nasional Tahun 2015-2019 adalah **meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan**. Adapun sumberdaya manusia yang berkualitas tercermin dari **meningkatnya akses pendidikan** yang berkualitas pada semua jenjang pendidikan, **meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan**, terutama kepada para ibu, anak, remaja dan lansia; meningkatnya pelayanan gizi masyarakat yang berkualitas, meningkatnya efektivitas pencegahan dan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, serta berkembangnya jaminan kesehatan. Selain itu menurut Kemenkokesra (2013), akses masyarakat terhadap infrastruktur dapat dilihat berdasarkan **akses rumah tangga terhadap listrik, akses pada kesehatan, akses terhadap air bersih**, dan akses terhadap sanitasi.

Selain itu, pembahasan dalam penelitian ini akan difokuskan pada dampak pertumbuhan industri secara makro dan mikro. Secara makro, pembahasan dampak pertumbuhan industri terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Bekasi secara keseluruhan. Sedangkan secara mikro, pembahasan dampak pertumbuhan industri terhadap kesejahteraan masyarakat dilihat pada

kecamatan-kecamatan terpilih sebagai sampel wilayah dalam studi ini (poin 1.6.6 Metode Penentuan sampel).

Tabel 1.1 Kriteria Kesejahteraan Masyarakat

No	Sumber Teori	Kriteria Kesejahteraan
1	Badan Pusat Statistik (2014)	a. Indikator Tunggal <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan • Kesehatan • Sosial-Ekonomi • Angkatan Kerja • Perumahan • Sanitasi & Air Bersih b. Indikator Komposit <ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pembangunan Manusia (IPM) • Indes Kemiskinan Manusia • Indeks Mutu Hidup
2.	Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (2013)	Kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui Indeks Kesejahteraan Rakyat (IKraR) melalui 3 dimensi: <ol style="list-style-type: none"> a. Dimensi keadilan sosial <ul style="list-style-type: none"> • Akses rumah tangga terhadap listrik • Rata-rata lama sekolah • Akses pada kesehatan • Rekreasi (olah raga dan seni) • Akses rumah tangga terhadap jaminan sosial • Penduduk yang diperkirakan tidak mencapai umur 40 tahun • Akses terhadap air bersih • Akses terhadap sanitasi • Persentase penduduk miskin • Tingkat kesenjangan (<i>Gini ratio</i>) b. Dimensi keadilan ekonomi <ul style="list-style-type: none"> • Rasio PAD terhadap APBD • Ketersediaan dan akses ke Bank • Jumlah penduduk Usia 15 tahun keatas yang bekerja • Jumlah penduduk yang memiliki rumah • Perbandingan pengeluaran penduduk dengan garis kemiskinan • Tingkat pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan • Tingkat pengeluaran masyarakat untuk kesehatan c. Dimensi demokrasi dan <i>governance</i> <ul style="list-style-type: none"> • Rasa Aman • Akses Informasi • Aspek Kebebasan Sipil • Aspek Hak-hak Politik • Aspek Lembaga Demokrasi

No	Sumber Teori	Kriteria Kesejahteraan
3.	Kolle (1974) dalam Bintarto (1989)	Kesejahteraan dapat diukur dari aspek kualitas hidup dari segi: <ol style="list-style-type: none"> Materi (Kualitas rumah dan bahan pangan) Fisik (Kesehatan tubuh dan lingkungan alam) Mental (Fasilitas pendidikan & lingkungan budaya) Spiritual (Moral, etika, dan keserasian penyesuaian)
4.	Drewnoski (1974)	<ol style="list-style-type: none"> tingkat perkembangan fisik (nutrisi, kesehatan dan harapan hidup) tingkat mental (pendidikan dan pekerjaan) integrasi dan kedudukan social (<i>social status</i>)
5.	Todaro (2003)	Kesejahteraan masyarakat dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat. Tingkat hidup masyarakat dapat diukur dari: <ol style="list-style-type: none"> tingkat kemiskinan tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, tingkat produktivitas masyarakat.
6.	Sen (2008)	Kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui: <ol style="list-style-type: none"> tingkat kehidupan (<i>levels of living</i>), pemenuhan kebutuhan pokok (<i>basic needs fulfillment</i>) kualitas hidup (<i>quality of life</i>) pembangunan manusia (<i>human development</i>)

Sumber: Kajian Literatur: 2015

1.5 Manfaat Studi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak lain. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini terdiri atas manfaat akademis dan manfaat praktis.

1.5.1 Manfaat Akademis

Manfaat secara akademis yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu dapat memberikan pengetahuan mengenai gambaran pertumbuhan sektor industri dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

1.5.2 Manfaat Praktik

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak pertumbuhan sektor industri terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi rekomendasi dan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Bekasi agar dapat mengupayakan pertumbuhan sektor industri sehingga mampu memperbaiki kesejahteraan masyarakat yang tercermin pada penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan, peningkatan tingkat pembangunan manusia, dan peningkatan akses masyarakat terhadap infrastruktur.

Dengan demikian pertumbuhan sektor industri diharapkan tidak hanya bergerak dalam menciptakan nilai saja, tetapi juga secara nyata mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi.

1.6 Metodologi Penelitian

Berikut ini akan diuraikan mengenai metodologi penelitian yang dilakukan pada studi ini. Metodologi penelitian dalam studi ini terdiri atas metode penelitian, metode pendekatan penelitian, konseptualisasi penelitian, operasionalisasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

1.6.1 Metode Penelitian

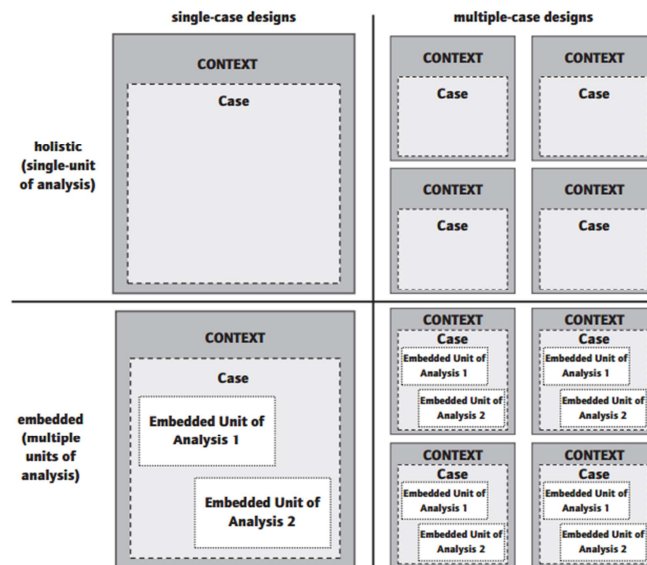
Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Metode ini dipilih dengan berdasar kepada pendapat Yin (2003) yang menyatakan bahwa metode studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan “bagaimana” dan “mengapa”, apabila peneliti hanya sedikit memiliki peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki, dan bilamana fokus penelitian terletak pada fenomena masa kini di dalam konteks kehidupan nyata. Selain itu, metode studi kasus mampu menguji suatu kasus secara mendalam (*in-depth*) dalam konteks kehidupan nyata.

Studi kasus digunakan sebagai suatu penjelasan komprehensif yang berkaitan dengan berbagai aspek seseorang, suatu kelompok, suatu organisasi, atau situasi kemasyarakatan yang diteliti dan ditelaah sedalam mungkin (Yin, 2003). Lebih lanjut, Stake (dalam Denzin & Lincoln, 1994) menyatakan bahwa studi kasus memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) Studi kasus adalah suatu bentuk penelitian (*inquiry*) atau studi tentang suatu masalah yang memiliki sifat kekhususan (*particularity*); (2) Dapat dilakukan baik dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif, tetapi lebih ditekankan pendekatan kualitatif; (3) Sasaran studi kasus dapat berupa perorangan (individu), kelompok, bahkan masyarakat luas.

Yin (2003) mengemukakan bahwa terdapat 4 tipe dasar desain studi kasus, antara lain: (1) Desain kasus tunggal holistik; (2) Desain kasus tunggal terjal

(*embedded*); (3) Desain multi kasus holistik; dan (4) Desain multi kasus terjalin (*embedded*).

Gambar 1.2 Tipe Dasar Desain Studi Kasus



Sumber: Yin, 2003

Pada penelitian ini tipe studi kasus yang dipakai adalah tipe 4 yaitu multi kasus (*multiple-case*) dengan unit analisis ganda. Kasus yang akan diangkat dalam penelitian ini meliputi dampak pertumbuhan industri terhadap kesejahteraan masyarakat ditinjau dari ruang lingkup makro dan mikro. Secara makro, studi kasus yang dilakukan dapat memberikan gambaran secara umum mengenai dampak pertumbuhan industri terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bekasi. Sedangkan secara mikro, studi kasus yang dilakukan mampu memberikan gambaran lebih mendetail mengenai dampak pertumbuhan industri terhadap kesejahteraan masyarakat di beberapa kecamatan terpilih. Kecamatan-kecamatan yang dipilih untuk dilakukan studi kasus akan dibahas pada poin 1.6.6 (metode penentuan sampel). Sedangkan untuk unit analisis yang akan digunakan dalam studi kasus ini mengacu pada operasionalisasi penelitian (poin 1.6.4).

1.6.2 Metode Pendekatan Studi

Metode pendekatan studi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran (*mixed methods*). Penelitian ini merupakan suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk penelitian yang telah ada sebelumnya yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Menurut

Creswell (2009), penelitian campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Sedangkan menurut Sugiyono (2011) metode penelitian kombinasi (*mixed methods*) adalah suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, *valid*, *reliable* dan obyektif. Dalam penelitian ini, metode campuran dipilih karena dalam penelitian ini terdapat data yang bersifat kuantitatif dan kualitatif.

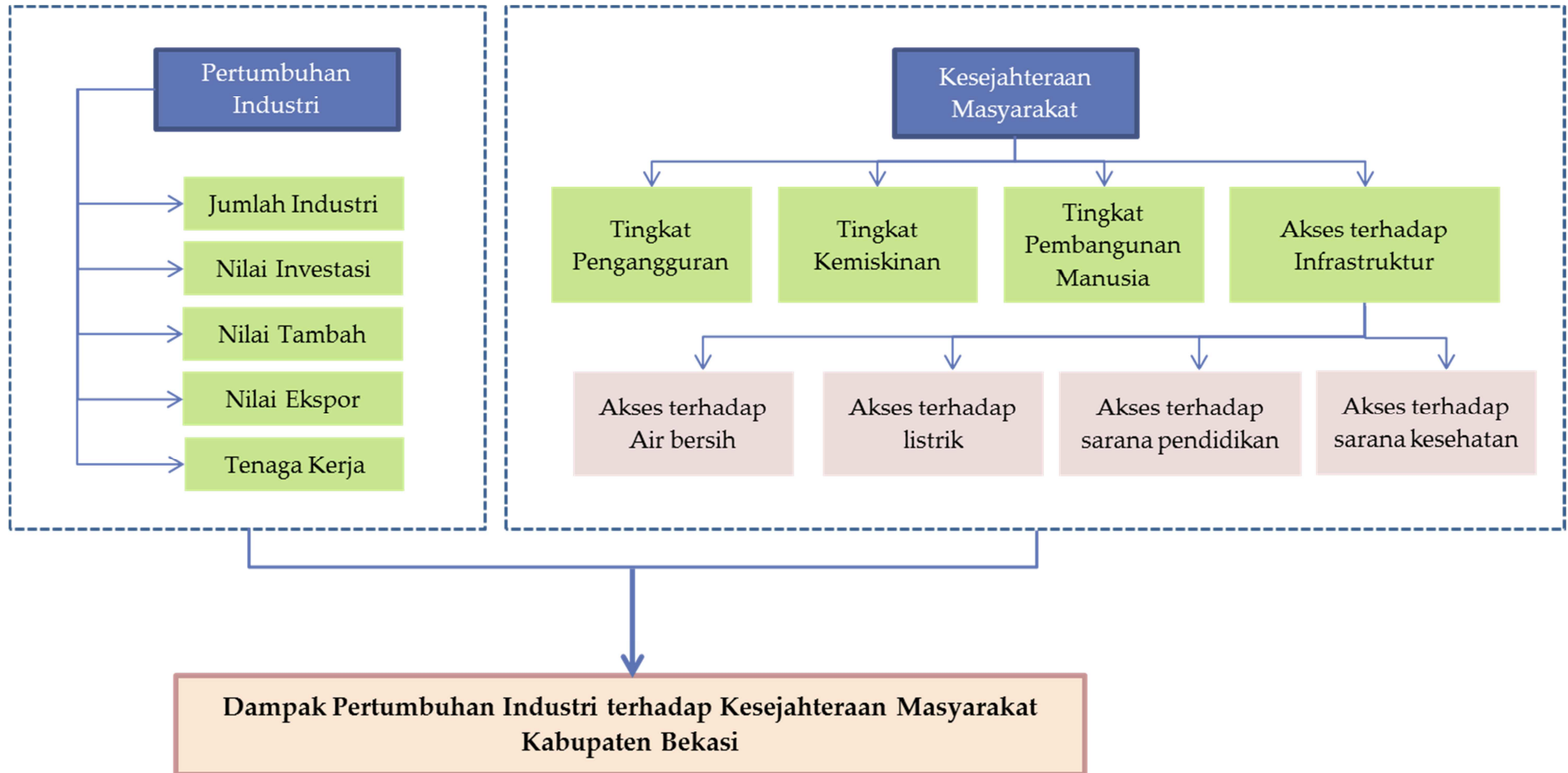
Pendekatan kuantitatif didefinisikan sebagai metode untuk meneliti hubungan antar variabel, yang terdiri dari angka-angka yang dapat dianalisis berdasarkan prosedur-prosedur statistik (Creswell, 2009). Selain itu menurut Robert Donmoyer (dalam Given, 2008), penelitian kuantitatif adalah pendekatan-pendekatan terhadap kajian empiris untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menampilkan data dalam bentuk numerik daripada naratif. Pendekatan kuantitatif yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh antara indikator pertumbuhan industri dengan indikator kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi.

Sedangkan pendekatan kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan, yang dianalisis secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum dan menafsirkan makna data (Creswell, 2009). Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini digunakan untuk memperkuat dan melengkapi analisis kuantitatif. Data yang ingin dicari umumnya bukan berbentuk kuantitas ataupun angka melainkan data-data kualitatif dari hasil wawancara maupun observasi.

1.6.3 Konseptualisasi Penelitian

Penyusunan konsep penelitian dilakukan dengan melakukan tinjauan pustaka terkait penelitian yang akan dilakukan. Penyusunan konsep yang dilakukan dalam penelitian ini adalah konsep mengenai pertumbuhan industri dan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 1.4 Konseptualisasi Penelitian



Sumber: Kajian literatur, 2015

1.6.4 Operasionalisasi Penelitian

Setelah dilakukan kajian literatur untuk merumuskan konsep penelitian secara umum, tahap selanjutnya adalah menurunkan konsep penelitian kedalam indikator dan tolok ukur berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan pada konsep tersebut. Tahap penyusunan indikator dan tolok ukur ini merupakan salah satu tahap dalam operasionalisasi penelitian yang kemudian diturunkan menjadi daftar kebutuhan data untuk kegiatan penelitian. Konsep pertumbuhan industri diturunkan menjadi lima kriteria, yaitu 1) jumlah industri, 2) nilai investasi, 3) nilai output, 4) nilai tambah, dan 5) jumlah tenaga kerja. Operasionalisasi konsep pertumbuhan industri dijabarkan pada tabel 1.2.

Tabel 1.2 Operasionalisasi Konsep Pertumbuhan Industri

No	Kriteria	Indikator	Tolok Ukur
1	Jumlah Industri (Kemenperin, 2015)	Pertumbuhan jumlah industri manufaktur	Jumlah industri manufaktur meningkat
2	Nilai Investasi Industri (Kuncoro, 2002)	Pertumbuhan nilai investasi di sektor industri	Nilai Investasi pada industri manufaktur meningkat
3	Nilai Output Industri (Kemenperin, 2015)	Pertumbuhan Nilai Ekspor industri	Nilai ekspor pada industri manufaktur meningkat
4	Nilai Tambah Industri (Kemenperin, 2015)	Pertumbuhan nilai tambah sektor industri (PDRB)	PDRB sektor industri manufaktur meningkat
5	Jumlah Tenaga Kerja Industri (Kemenperin, 2015)	Pertumbuhan tenaga kerja di sektor industri	Penyerapan tenaga kerja di sektor industri manufaktur meningkat

Sumber: Kemenperin, 2015; dan Kuncoro, 2002

Selain itu, dirumuskan pula operasionalisasi untuk konsep kesejahteraan masyarakat. Adapun kriteria kesejahteraan masyarakat dapat dilihat melalui tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, tingkat pembangunan manusia, dan akses terhadap infrastruktur. Operasionalisasi untuk konsep kesejahteraan masyarakat dijabarkan dalam Tabel 1.3.

Tabel 1.3 Operasionalisasi Konsep Kesejahteraan Masyarakat

No	Kriteria	Indikator	Tolok Ukur
1	Tingkat Pengangguran (Todaro, 2003; Kemenkokesra, 2013)	Menurunnya angka pengangguran	Jumlah pengangguran semakin berkurang, seiring dengan pertumbuhan industri Pertumbuhan sektor industri memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat
2	Tingkat kemiskinan (Kemekokesra, 2013)	Menurunnya angka kemiskinan	Jumlah penduduk miskin atau persentase penduduk miskin berkurang seiring dengan pertumbuhan sektor industry
3	Tingkat Pembangunan manusia (Sen, 2008; BPS, 2014)	Meningkatnya Indeks Pembangunan manusia	IPM Kabupaten Bekasi meningkat seiring dengan pertumbuhan industri <ul style="list-style-type: none"> • Indikator pendidikan meningkat • Indikator kesehatan meningkat • Indikator Daya beli masyarakat meningkat
4	Akses terhadap infrastruktur (World Bank, 2007; Kemekokesra, 2013)	Akses terhadap air bersih	<ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan mendapat infrastruktur air bersih meningkat • Keterjangkauan biaya penyediaan air bersih meningkat
		Akses terhadap listrik	<ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan akses pada listrik meningkat • Keterjangkauan biaya dalam mengakses listrik meningkat
		Akses terhadap sarana pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan sarana pendidikan meningkat • Kemudahan mencapai lokasi sarana pendidikan meningkat • Keterjangkauan biaya dalam mengakses pelayanan pendidikan meningkat
		Akses terhadap sarana kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan sarana kesehatan meningkat • Kemudahan mencapai lokasi sarana kesehatan meningkat • Keterjangkauan biaya dalam mengakses pelayanan kesehatan meningkat

Sumber: Todaro, 2003; World Bank, 2007; Sen, 2008; Kemenkokesra, 2013; dan BPS, 2014

1.6.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri atas pengumpulan data primer dan data sekunder dengan beberapa metode pengumpulan data. Data primer dibutuhkan dalam menggali informasi langsung dari masyarakat dan pemerintah terkait kondisi kesejahteraan masyarakat serta bagaimana perkembangan industri yang terjadi di Kabupaten Bekasi. Selain itu, data primer juga dibutuhkan untuk memperoleh kondisi-kondisi eksisting dari kecamatan-kecamatan terpilih melalui observasi. Survei data primer dilakukan dengan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi.

Sementara itu, data sekunder dibutuhkan untuk mendapatkan gambaran mengenai pertumbuhan industri dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat Kabupaten Bekasi termasuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat di Kecamatan terpilih. Survey data sekunder dilakukan dengan tinjauan dokumen dan kajian-kajian literatur terkait.

1. Wawancara mendalam (*in-depth interview*)

Bungin (2007) mengemukakan bahwa wawancara mendalam secara umum merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama. Lebih lanjut, Sugiyono (2011) mengemukakan bahwa melalui wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang informan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi yang tidak bisa ditemukan melalui observasi. Adapun tujuan dari wawancara mendalam adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara (informan) diminta pendapat, dan ide-idenya.

Wawancara mendalam ini dilakukan untuk menggali informasi mengenai pertumbuhan industri di Kabupaten Bekasi serta melihat sejauh mana dampak pertumbuhan industri terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi. Wawancara dilakukan kepada masyarakat dan tokoh masyarakat, Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan di wilayah studi kasus serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Bekasi.

2. Observasi

Bungin (2007) mengemukakan bahwa observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Penelitian ini menggunakan metode observasi lapangan untuk melihat kondisi eksisting wilayah studi dalam penelitian ini secara langsung sebagai informasi tambahan dari wawancara. Objek observasi dalam penelitian ini adalah pengamatan kegiatan industri serta kondisi sarana dan prasarana di wilayah studi.

3. Tinjauan Dokumen dan Literatur

Dokumen dan literatur yang akan ditinjau meliputi dokumen statistik, dokumen kebijakan, profil lembaga, ataupun literatur yang telah terpublikasikan seperti buku, jurnal, artikel dan sebagainya. Dokumen-dokumen tersebut diperoleh dari beberapa instansi yaitu, Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi, Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Barat, Badan Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi, Badan Pusat Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi, serta Dinas Perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM Kabupaten Bekasi.

1.6.6 Metode Penentuan Sampel

Metode penentuan sampel dalam penelitian ini terdiri dari metode penentuan sampel wilayah kecamatan untuk studi kasus dan metode penentuan responden yang akan diteliti dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

1. Metode Penentuan Sampel Wilayah Kecamatan

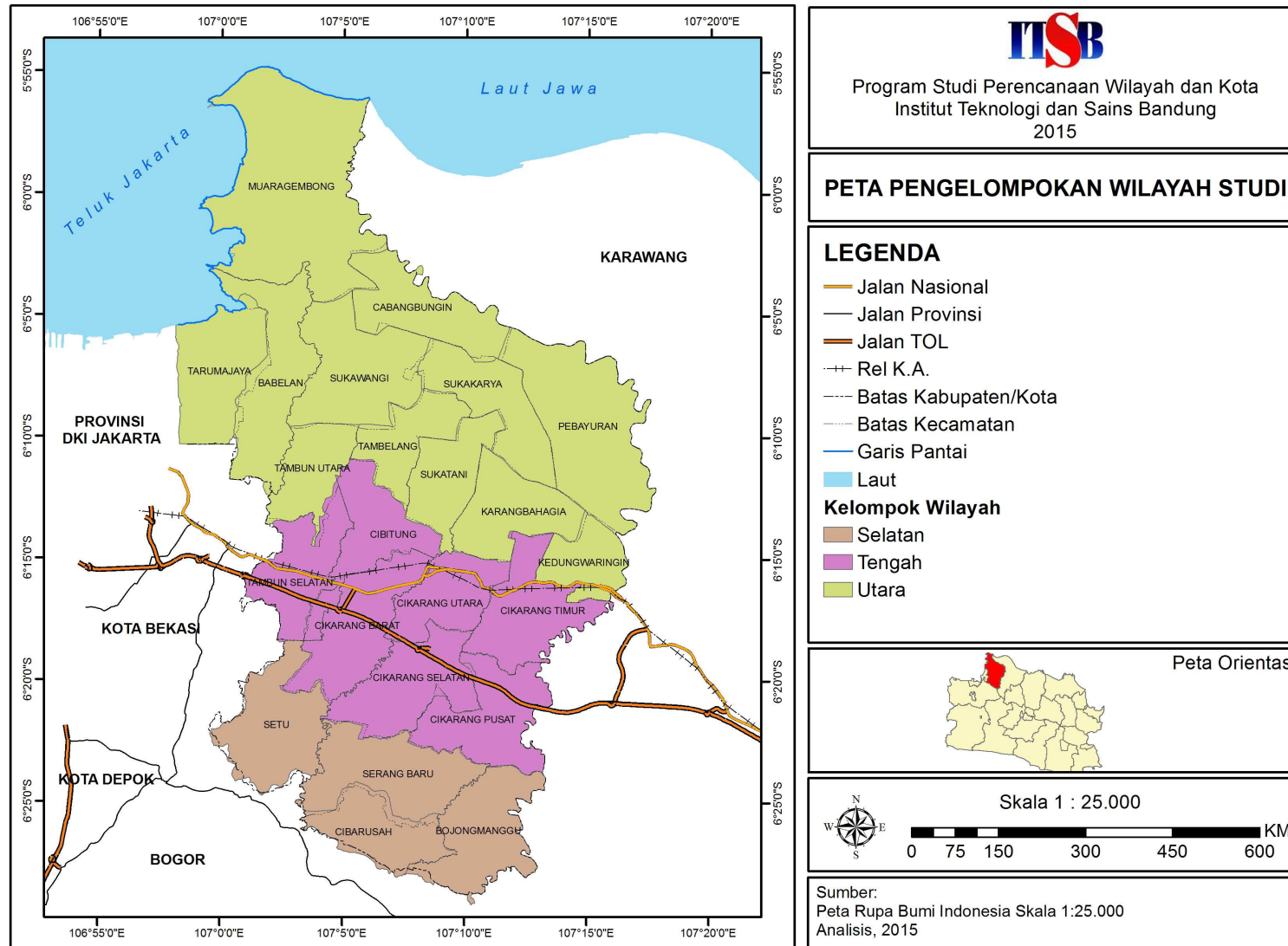
Wilayah Kecamatan yang dipilih sebagai studi kasus dipilih dengan menggunakan teknik *cluster sampling*. Dari 23 kecamatan di Kabupaten Bekasi dikelompokkan menjadi 3 kelompok wilayah, yaitu wilayah utara, wilayah tengah, dan wilayah selatan. Pengelompokkan wilayah tersebut dilakukan dengan cara mengklasifikasikan kecamatan di Kabupaten Bekasi berdasarkan jumlah industri manufaktur dan PDRB sektor industri di tiap kecamatan tahun 2013. Kelompok wilayah dengan jumlah industri manufaktur dan PDRB pada sektor industri yang paling tinggi diklasifikasikan sebagai wilayah tengah. Dalam pengelompokan

wilayah tengah ini penulis mempertimbangkan pula pola ruang eksisting dan rencana pola ruang RTRW Kabupaten Bekasi tahun 2011-2031. Sementara itu, kecamatan diluar wilayah tengah diklasifikasikan sebagai wilayah utara dan selatan.

Berdasarkan hasil pengelompokan, wilayah tengah terdiri atas Kecamatan Cikarang Pusat, Cikarang Timur, Cikarang Barat, Cikarang Selatan, Cikarang Utara, Cibitung, dan Tambun Selatan. Wilayah selatan terdiri dari atas Kecamatan Setu, Serang Baru, Cibarusah, dan Bojongmangu. Sedangkan Wilayah utara terdiri atas Kecamatan Muaragembong, Cabangbungin, Tarumajaya, Babelan, Sukawangi, Sukakarya, Pebayuran, Tambelang, Tambun Utara, Sukatani, Karang Bahagia, dan Kedung Waringin. Pengelompokan wilayah studi ini dipetakan pada gambar 1.4

Setelah pengelompokan wilayah studi dilakukan, tahap selanjutnya adalah memilih satu kecamatan untuk dijadikan sampel studi kasus dalam tiap kelompok wilayah. Pemilihan sampel kecamatan ini dilakukan secara *random sampling*, dengan asumsi bahwa setiap kecamatan di tiap kelompok wilayah memiliki karakteristik yang sama. Setelah dilakukan *random sampling*, 3 kecamatan terpilih yaitu **Kecamatan Muaragembong** (Wilayah Utara), **Kecamatan Cikarang Barat** (Wilayah Tengah), dan **Kecamatan Cibarusah** (Wilayah Selatan).

Gambar 1.4 Peta Pengelompokan Wilayah Studi



2. Metode Penentuan Responden

Metode penentuan responden yang akan diteliti dengan pendekatan penelitian kualitatif ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan teknik *snowball sampling*. Penentuan sampel responden diawali dengan teknik *purposive sampling* dengan menentukan kriteria narasumber yang akan diwawancarai. Setelah kriteria tersusun dan sudah ditentukan sampel awal, maka selanjutnya dilakukan teknik *snowball sampling* untuk menentukan sampel berikutnya. Proses *snowball sampling* ini akan berhenti saat data yang didapatkan sudah mencapai titik jenuh. Berikut ini akan dijelaskan tahapan pemilihan narasumber untuk penelitian ini secara lebih mendetail.

a. *Purposive sampling*

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel narasumber dengan pertimbangan tertentu yakni narasumber dianggap paling tahu tentang situasi sosial yang sedang diteliti (Sugiyono, 2011). Sejalan dengan hal tersebut, Bungin (2007) mengemukakan bahwa *purposive sampling* adalah salah satu strategi dalam menentukan informan yang paling umum di dalam penelitian kualitatif, yaitu dengan cara menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu. Besaran informan kunci (*key person*) disesuaikan dengan struktur sosial saat pengumpulan data dilakukan. Kunci dasar penggunaan prosedur ini adalah penguasaan informasi dari informan dan secara logika bahwa tokoh-tokoh kunci di dalam proses sosial selalu langsung menguasai informasi yang terjadi di dalam proses sosial itu. Kriteria narasumber berdasarkan *purposive sampling* adalah sebagai berikut.

Tabel 1.5 Kriteria Narasumber Berdasarkan Teknik *Purposive Sampling*

Kriteria	Narasumber	Informan Kunci
Instansi yang mengetahui dampak pertumbuhan industri terhadap kesejahteraan masyarakat secara umum di wilayah studi	Instansi	Pemerintah Kecamatan
Masyarakat lokal yang menetap di wilayah studi selama kurang lebih 10 tahun dan merasakan dampak dari pertumbuhan industri di wilayah studi	Masyarakat Lokal	Tokoh Masyarakat
Instansi yang mengetahui pertumbuhan dan perkembangan Industri di wilayah studi	Dinas Perindagkop &UMKM	

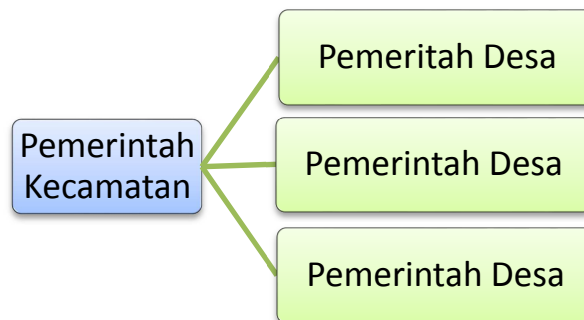
Sumber: Hasil Kajian, 2015

b. *Snowball Sampling*

Snowball sampling merupakan salah satu metode pengambilan sampel dengan cara menentukan terlebih dahulu informan kunci dari suatu populasi menggunakan metode lain (*purposive sampling*). Kemudian informan kunci ini menunjuk narasumber lain untuk diwawancarai. Proses ini dilakukan secara terus menerus sesuai dengan petunjuk narasumber. Proses ini berhenti ketika narasumber telah memberikan jawaban yang sama (ILO, 2009). Dengan kata lain, proses *snowball sampling* ini akan terus dilakukan dan dihentikan manakala data yang ada sudah jenuh sehingga dari berbagai informan baik yang lama maupun yang baru sudah tidak memberikan informasi baru lagi.

Dalam penelitian ini, *snowball sampling* yang dilakukan dengan 2 informan kunci yaitu Pemerintah Kecamatan dan Tokoh masyarakat. Pemerintah Kecamatan yang dimaksud terdiri atas Kecamatan Muaragembong, Kecamatan Cikarang Pusat dan Kecamatan Cibarusah. Secara umum, proses *snowball sampling* yang dilakukan dalam penelitian ini dapat diilustrasikan pada gambar 1.5. dan gambar 1.6.

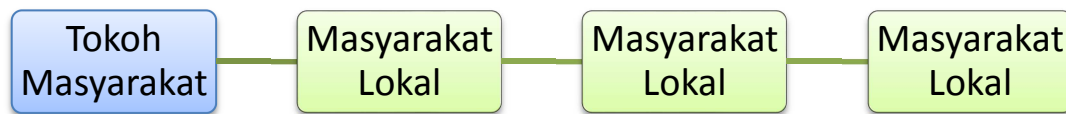
Gambar 1.5 *Snowball Sampling* dengan Informan Kunci Pemerintah Kecamatan



Sumber: Analisis, 2015

Informan kunci dari *snowball sampling* ini adalah Pemerintah Kecamatan selaku instansi yang mengetahui gambaran umum dampak pertumbuhan industri terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah studi. Dari Pemerintah Kecamatan ini kemudian diberikan rekomendasi Pemerintah Desa sebagai narasumber berikutnya.

Gambar 1.6 *Snowball Sampling* dengan Informan Kunci Tokoh Masyarakat



Sumber: Analisis, 2015

Snowball sampling yang dilakukan dengan informan kunci tokoh masyarakat sebagai perwakilan masyarakat yang diyakini mengetahui dampak pertumbuhan industri terhadap kesejahteraan masyarakat. Adapun masyarakat lokal disini merupakan individu yang merasakan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung dari pertumbuhan industri di Kabupaten Bekasi. Baik tokoh masyarakat maupun masyarakat lokal memiliki kriteria yang sama, yaitu keduanya telah menetap di suatu wilayah studi selama kurang lebih 10 tahun sehingga diharapkan dapat mengetahui perbedaan sebelum dan setelah adanya pertumbuhan industri di wilayah studi. Daftar narasumber yang didapatkan melalui *snowball sampling* beserta waktu dalam pengumpulan data dapat dilihat pada tabel 1.5 dan tabel 1.6.

Tabel 1.5 Daftar Narasumber menggunakan Teknik *Snowball Sampling* dengan Informan Kunci Pemerintah Kecamatan

No	Informan Kunci	Tanggal Pengumpulan Data	Narasumber	Tanggal Pengumpulan Data
1	Pemerintah Kecamatan Muaragembong (Bapak Ahmadurazak, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa)	10 Juni 2015	1) Pemerintah Desa Pantai Mekar (Bapak Syahrudin, Sekretaris Desa)	10 Juni 2015
			2) Pemerintah Desa Pantai Sederhana (Bapak Jejen, Staf Pemerintahan)	10 Juni 2015
2	Pemerintah Kecamatan Cikarang Barat (Ibu Isum Sumarni, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa)	11 Juni 2015	1) Pemerintah Kelurahan Telaga Asih (Karya S.E, Kepala Urusan Pemerintahan)	11 Juni 2015
			2) Pemerintah Desa Telajung (Bapak Sudarma Wijaya, Sekretaris Desa)	12 Juni 2015
			3) Pemerintah Desa Sukadanau (Bapak Abdurahman Basae, Kepala Urusan Pemerintahan)	15 Juni 2015
3	Pemerintah Kecamatan Cibarusah (Bapak Deswantoro, Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa)	23 Juni 2015	1) Pemerintah Desa Sirnajati (M. Sukardi, Kepala Urusan Pemerintahan)	23 Juni 2015
			2) Pemerintah Desa Rido Galih (Bapak Aef, Sekretaris Desa)	23 Juni 2015

Sumber: Analisis, 2015

Tabel 1.6 Daftar Narasumber menggunakan Teknik *Snowball Sampling* dengan Informan Kunci Tokoh Masyarakat

No	Informan Kunci	Narasumber	Identitas Narasumber				Tanggal Pengumpulan Data
			Alamat	Usia	Pekerjaan	Pendidikan Terakhir	
A	Kecamatan Muaragembong						
1	Bapak Amir (50 tahun) Alamat :Desa Pantaimekar Pekerjaan :Petani Tambak Pendidikan Terakhir : SMK	1) Bapak Ayatin	Desa Pantai Mekar	40	Petani Tambak	SMP	10 Juni 2015
		2) Bapak Mualaf	Desa Pantai Mekar	62	Buruh Tani	SD	10 Juni 2015
		3) Bapak Karniman	Desa Pantai Mekar	48	Buruh Tani	SD	10 Juni 2015
		4) Bapak Dito	Desa Pantai Mekar	39	Wiraswas-ta	SMP	10 Juni 2015
		5) Ibu Maemunah	Desa Pantai Mekar	35	Pedagang	SMP	10 Juni 2015
		6) Ibu Eni	Desa Pantai Mekar	35	Pedagang	SD	10 Juni 2015
2	Bapak Gimang (50 tahun) Alamat : Desa Pantaiharapanjaya Pekerjaan : Petani Pendidikan : SD	1) Bapak Samba	Desa Pantaiharapanjaya	45	Petani	SD	10 Juni 2015
		2) Ibu Kinah	Desa Pantaiharapanjaya	35	IRT	SD	10 Juni 2015
B	Kecamatan Cikarang Barat						
1	Ibu Supriati (50 tahun) Alamat : Kel. Telaga Asih Pekerjaan : IRT Pendidikan Terakhir : SMP	1) Bapak Yano	Kelurahan Telaga Asih	45	Karyawan Swasta	SMA	11 Juni 2015
		2) Ibu Nur	Kelurahan Telaga Asih	50	IRT	SD	11 Juni 2015
		3) Bapak Adi	Kelurahan Telaga Asih	30	Wiraswas-ta		11 Juni 2015
2	Bapak Wanda (Laki-Laki, 60 Tahun) Alamat : Kel. Telaga Asih Pekerjaan : Linmas Pendidikan Terakhir : SMP	1) Ibu Arpianti	Desa Sukadanau	55	IRT	SD	15 Juni 2015
		2) Ibu Nunung	Desa Sukadanau	52	IRT	SMP	15 Juni 2015
		3) Ibu Ati	Desa Sukadanau	31	IRT	SMA	15 Juni 2015

No	Informan Kunci	Narasumber	Identitas Narasumber				Tanggal Pengumpulan Data
			Alamat	Usia	Pekerjaan	Pendidikan Terakhir	
C	Kecamatan Cibusah						
1	Bapak Supriyadi (48 tahun) Alamat : Desa Ridogalih Pekerjaan : Pedagang Pendidikan Terakhir : SMK	1) Ibu Sanih	Desa Ridogalih	43	IRT	SD	23 Juni 2015
		2) Ibu Acah	Desa Ridogalih	36	IRT	SD	23 Juni 2015
		3) Bapak Saeful	Desa Ridogalih	42	Supir	SD	23 Juni 2015

Sumber: Analisis, 2015

1.6.7 Metode Analisis Data

Untuk mengetahui dampak pertumbuhan industri terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi, maka diperlukan beberapa metode analisis yang digunakan untuk menjawab keempat sasaran yang telah dirumuskan. Adapun metode analisis data dalam penelitian ini meliputi analisis data kuantitatif dan kualitatif.

1. Metode Analisis Data Kuantitatif

Analisis data kuantitatif dilakukan melalui metode analisis statistik deskriptif dan metode analisis regresi. Metode analisis statistik deskriptif dilakukan untuk mendapatkan gambaran kondisi sesungguhnya di wilayah studi. Analisis ini dilakukan dengan cara mengorganisasi dan menyimpulkan informasi secara numerik, dengan menginterpretasikan variabel penelitian satu persatu. Penyajian hasil analisis deskriptif ini berupa persentase, grafik maupun diagram pada data yang bersifat kategorikal maupun *time-series*. Analisis statistik deskriptif ini dilakukan agar penyajian data dan informasi mudah dipahami oleh pembaca. Dengan demikian metode ini bertujuan untuk mengungkapkan hasil penelitian secara jelas dan ringkas tanpa mengurangi makna dan informasi penting yang terkandung di dalamnya (Healey, 2010).

Selain itu, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi dengan menggunakan teknik regresi linier berganda. Metode ini berguna untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen (Healey, 2010). Teknik regresi linier berganda digunakan untuk mengidentifikasi pengaruh antara variabel pertumbuhan industri dengan variabel kesejahteraan masyarakat. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan software IBM SPSS Statistics 21.

Variabel yang digunakan dalam analisis regresi linier berganda ini terdiri dari variabel dependen (Y) dan variabel independen (X). Variabel dependen merupakan variabel yang diidentifikasi sebagai variabel akibat (*effect* or *outcome variable*) yang disebabkan atau dipengaruhi oleh variabel independen. (Healey, 2010). Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini yaitu indikator kesejahteraan

masyarakat yang meliputi Tingkat Pengangguran (Y1), Tingkat kemiskinan (Y2), Tingkat Pembangunan manusia (Y3). Sedangkan variabel independen adalah variabel yang diidentifikasi sebagai penyebab yang mempengaruhi variabel dependen (Healey 2010). Variabel independen (X) dalam penelitian ini adalah indikator pertumbuhan industri yang meliputi Jumlah Industri (X1), Nilai Investasi (X2), Nilai Ekspor (X3), PDRB Sektor Industri (X4), Tenaga Kerja Industri (X5). Data yang digunakan dalam analisis regresi ini berupa data *time series* mulai dari tahun 1999-2013 dan dianalisis dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% atau nilai signifikansi $\alpha=0,05$. Adapun model analisis regresi linier berganda dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

$$Y_{1,2,3} = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 \quad (1.1)$$

Keterangan:

Y_1 = Tingkat Pengangguran

Y_2 = Tingkat Kemiskinan

Y_3 = Tingkat Pembangunan Manusia

X_1 = Jumlah Industri

X_2 = Nilai Investasi

X_3 = Nilai Ekspor

X_4 = PDRB Sektor Industri

X_5 = Tenaga Kerja Industri

a = nilai konstan

b = koefisien regresi variabel independen

Metode yang digunakan dalam membentuk persamaan regresi dalam penelitian ini adalah metode *stepwise*, yaitu variabel bebas dimasukkan satu persatu dan variabel yang tidak memiliki korelasi dengan variabel dependen dapat dikeluarkan. Output yang dihasilkan dari analisis regresi adalah koefisien regresi (*b-weight* atau *standardized coefficient*) untuk masing-masing variabel independen yang dapat digunakan selain untuk mengukur kekuatan atau besarnya pengaruh pertumbuhan industri terhadap kesejahteraan masyarakat, juga menunjukkan arah hubungan antara indikator pertumbuhan industri terhadap

indikator kesejahteraan masyarakat. Arah hubungan ini ditunjukkan dengan tanda positif (+) atau negatif (-). Jika dalam mengukur korelasi dua variabel, diperoleh nilai R positif, maka apabila salah satu variabel mengalami kenaikan maka variabel lain pun akan mengalami kenaikan. Sebaliknya, jika diperoleh nilai R negatif (-) berarti kenaikan salah satu variabel maka variabel lain mengalami penurunan.

Dalam analisis regresi linier berganda akan dilakukan beberapa pengujian antara lain:

a. Uji korelasi

Uji korelasi dilakukan untuk melihat kekuatan hubungan antara variabel dependen dan independen. Pengujian ini dilakukan dengan melihat koefisien korelasi R-Pearson antara variabel independen dengan variabel yang berada pada kisaran 0-1. Nilai 0 menunjukkan tidak terdapat hubungan, sementara nilai 1 menunjukkan adanya hubungan sempurna antara dua variabel (Healey, 2010).

Tabel 1.7 Indeks korelasi R-Pearson

No	Nilai	Kekuatan Hubungan
1	0,00-0,30	Lemah (<i>Weak</i>)
2	0,30-0,60	Sedang (<i>Moderate</i>)
3	0,60-1,00	Kuat (<i>Strong</i>)

Sumber: Healey, 2010

b. Uji Asumsi klasik

Pengujian ini terdiri dari uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heterokedastisitas, dan uji normalitas. Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji adanya korelasi antar variabel independen, mengingat model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2005). Untuk melihat ada atau tidaknya multikoleniaritas dalam model regresi adalah berdasarkan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF), dan nilai *tolerance* pada output SPSS. Apabila nilai *tolerance* mendekati 1, serta nilai VIF berkisar antara 1-10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas antara variabel bebas dalam model regresi (Ghozali, 2005).

Selanjutnya uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1, dimana jika terjadi korelasi

dinamakan ada problem autokorelasi (Ghozali, 2005). Uji autokorelasi dilakukan dengan cara melihat nilai *Durbin Watson* pada output SPSS. Nilai $1 < DW < 3$ menunjukkan tidak terdapatnya autokorelasi dalam model regresi.

Adapun uji heterokedastisitas dilakukan untuk untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2005). Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan membuat *Scatterplot* (alur sebaran) antara residual (ZRESID) dan nilai prediksi (ZPRED) dari variabel terikat yang telah distandarisasi. Hasil uji heterokedastisitas didasarkan pada ada tidaknya pola yang terbentuk pada *scatterplot*. Jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada membentuk pola tertentu teratur (bergelombang, melebur kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Namun jika tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Sedangkan uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat, variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau penyebaran data statistik pada sumbu diagonal dari grafik distribusi normal (Ghozali, 2005). Uji normalitas dilakukan dengan melihat *normal probability plot* pada output SPSS. Apabila data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, berarti data residual terdistribusi normal dan model regresi memenuhi asumsi normalitas.

c. Uji kelayakan model atau *goodness of fit model*

Pengujian ini terdiri dari uji F, uji T, dan koefisien determinasi. Uji keterandalan model atau uji kelayakan model atau yang lebih populer disebut sebagai uji F merupakan tahapan awal mengidentifikasi model regresi yang diestimasi layak atau tidak. Layak (andal) disini maksudnya adalah model yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji F juga digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel dependen secara bersama-sama dengan terlebih dahulu membuat hipotesis sebagai berikut:

- $H_0: b_1=b_2=b_3=b_4=b_5=0$, yaitu tidak ada pengaruh secara signifikan antara variabel independen dan variabel dependen
- $H_1: b_1=b_2=b_3=b_4=b_5 \neq 0$ yaitu terdapat pengaruh secara signifikan antara variabel independen dan variabel dependen

Uji F dilakukan dengan melihat nilai *prob. F* hitung (sig) tabel **ANOVA^a** pada output SPSS. Jika nilai F-hitung atau *Sig.* < tingkat signifikansi α , maka H_0 ditolak, artinya variabel independen secara signifikan mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

Sedangkan Uji T dilakukan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen (Ghozali 2005). Pada uji T ini menggunakan hipotesis sebagai berikut:

- $H_0: \alpha_1= \alpha_2= \alpha_3= \alpha_4= \alpha_5=0$, tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen secara individu terhadap variabel dependen
- $H_1: \alpha_1= \alpha_2= \alpha_3= \alpha_4= \alpha_5 \neq 0$, terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen secara individu terhadap variabel dependen

Uji T dilakukan dengan melihat nilai prob t hitung. pada tabel **Coefficients^a**: Apabila nilai prob. t hitung (ouput SPSS ditunjukkan pada kolom sig.) lebih kecil dari tingkat kesalahan $\alpha=0,05$ maka H_1 diterima. Dengan kata lain variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sedangkan apabila nilai prob. t hitung lebih besar dari tingkat kesalahan $\alpha=0,05$ maka H_0 diterima atau variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Pada uji kelayakan model dilakukan pula uji koefisien Determinasi (R^2). Koefisien determinasi merupakan besaran yang menunjukkan besarnya variansi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variable independennya. Dengan kata lain, koefisien determinasi ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh variabel-variabel bebas dalam menerangkan variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan nilai *Adjusted R square* pada output SPSS.

2. Metode Analisis Data Kualitatif

Selain analisis pendekatan kuantitatif, pada penelitian ini dilakukan pula analisis dalam pendidikan kualitatif. Analisis dengan pendekatan kualitatif digunakan dalam mengidentifikasi dampak pertumbuhan industri terhadap tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, tingkat pembangunan manusia, dan akses masyarakat pada sarana dan prasarana di kecamatan yang menjadi sampel penelitian (Kecamatan Muaragembong, Cikarang Barat, dan Cibarusah).

Analisis kualitatif pada penelitian ini menggunakan pendekatan *interpretive explanatory*. Pendekatan *interpretive explanatory* ini terdiri dari aktifitas memeriksa, mengelompokan, membuat tabulasi, membandingkan bukti kualitatif dalam rangka menguji proposisi. Adapun strategi umum dalam pendekatan *interpretive explanatory* ini antara lain:

- Didasarkan pada proposisi teoretis (*Relied on theoretical proposition*) yang telah dibuat sebelumnya dari hasil kajian teori.
- Analisis terhadap data diarahkan untuk menguji proposisi yang telah dibuat.

Yin (2011) menyatakan bahwa proposisi teoretis yang telah dibuat diawal mampu mengarahkan suatu penelitian terhadap suatu kesimpulan. Selain itu, proposisi juga mampu menjelaskan persoalan kunci suatu studi atau untuk membuat suatu prediksi. Pada penelitian ini proposisi teoretik dibuat agar dapat menjawab sasaran yang telah dibuat. Adapun proposisi yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1.8.

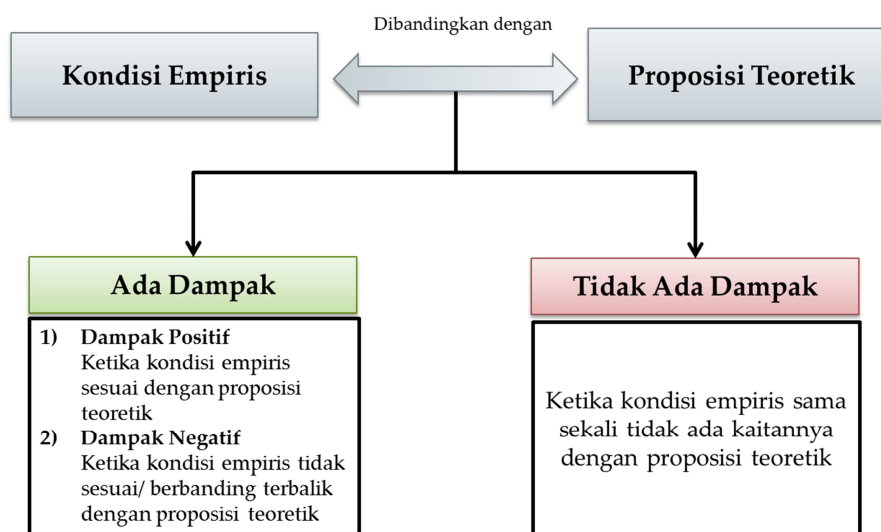
Tabel 1.8 Proposisi Teoretik dalam Analisis Kualitatif

No	Sasaran	Proposisi
1	Mengidentifikasi dampak pertumbuhan industri pada tingkat pengangguran	Industri tumbuh, tingkat pengangguran menurun
2	Mengidentifikasi dampak pertumbuhan industri pada tingkat kemiskinan	Industri tumbuh, tingkat kemiskinan menurun
3	Mengidentifikasi dampak pertumbuhan industri pada tingkat pembangunan manusia	Industri tumbuh, tingkat pembangunan manusia meningkat
4	Mengidentifikasi dampak pertumbuhan industri pada akses masyarakat terhadap infastruktur	Industri tumbuh, akses masyarakat pada infastruktur meningkat

Sumber: Kajian Literatur, 2015

Teknik analisis yang digunakan dalam menguji proposisi teoretik tersebut adalah dengan teknik *pattern matching*. *Pattern matching* ini merupakan teknik yang cocok digunakan untuk penelitian studi kasus dimana beberapa informasi dari kasus (kondisi empiris) mungkin memiliki hubungan dengan suatu proposisi. Terdapat dua pola potensial yang digunakan dalam menguji proposisi yaitu ada dampak (*an effect proposition*) dan tidak ada dampak (*no effects proposition*) (Campbell dalam Yin, 2003). Dalam penelitian ini, dilakukan pengujian proposisi dengan membandingkan antara kondisi empiris di lapangan dengan proposisi teoretik yang telah dibuat. Proses pengujian proposisi menggunakan teknik *pattern matching* tersebut diilustrasikan melalui gambar 1.7.

Gambar 1.7 Ilustrasi Pengujian Proposisi Menggunakan Teknik *Pattern Matching*



Sumber: Kajian Literatur, 2015

Adapun untuk menganalisis data kualitatif pada penelitian ini digunakan pula analisis isi transkrip wawancara. Tahap pertama dalam analisis adalah proses transkripsi data yang diperoleh selama proses survey lapangan. Setelah itu dilakukan reduksi data yang diperoleh untuk memilih hal-hal pokok dari sekian banyak data. Jawaban yang telah direduksi kemudian menjadi input untuk proses konstruksi data yang merupakan tahapan analisis selanjutnya. Setelah tahapan reduksi dilakukan proses konstruksi data ke dalam indikator dan tolok ukur dan mengkatagorikannya sesuai dengan kriteria dan variabel yang sudah ditentukan

sebelumnya. Proses reduksi dan pengelompokan data dapat diilustrasikan pada tabel 1.9.

Tabel 1.9 Proses Reduksi Data Kualitatif

Informasi	Narasumber	Pernyataan
Akses masyarakat Kecamatan Cibusah terhadap air bersih	Pak Deswanto, Kasi PMD Kecamatan Cibusah	Untuk air bersih memang saat ini kita masih kesulitan. PDAM baru masuk di perumahan formal saja
	M. Sukardi, Kaur Pemerintahan Desa Sirnajati,	PDAM belum masuk di Desa Sirnajati, masih pakai air tanah
	Bapak Aef, Sekretaris Desa Ridogalih	Mayoritas penduduk masih menggunakan air tanah atau air kali. PDAM belum ada ke Desa Ridogalih.
Akses masyarakat Kecamatan Cikarang Barat terhadap air bersih	Ibu Isum Sumiati, Kasi PMD Kecamatan Cikarang Barat,	Sebagian besar penduduk Kecamatan Cikarang Barat masih menggunakan air tanah. Untuk kesulitan dalam mengakses air bersih sendiri mungkin terjadi, namun kesulitan ini tidak terjadi di seluruh kecamatan, Hanya setempat-setempat saja, khususnya yang lokasinya sangat dekat dengan kawasan (industri)
	Pak Sudarma Wijaya, Sekretaris Desa Telajung	Di Desa Telajung masih bersumber dari air tanah. Disini belum masuk PDAM. Bahkan di perumahan formal pun masih menggunakan air tanah. Desa ini masih jarang industri sehingga kondisi airnya masih bersih

Sumber: Hasil Kajian, 2015

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan kerangka laporan penelitian secara umum yang menggambarkan isi penelitian. Secara garis besar sistematika penulisan dalam studi penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan merupakan dasar penelitian dan pemikiran awal penelitian yang terdiri atas latar belakang, rumusan persoalan, tujuan dan sasaran, ruang lingkup studi, manfaat penelitian, metodologi penelitian serta sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN LITERATUR

Pada bab ini akan dijelaskan tinjauan teori pertumbuhan dan perkembangan wilayah, teori industri, teori kesejahteraan masyarakat, dan peran industri untuk kesejahteraan masyarakat.

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI

Bab ini berisi penjelasan mengenai gambaran umum wilayah studi yang meliputi gambaran umum Kabupaten Bekasi yang meliputi karakteristik geografis, sosial kependudukan dan ketenagakerjaan, karakteristik perekonomian wilayah, arahan pengembangan sektor industri, gambaran umum sektor industri, dan karakteristik sarana dan prasarana.. Selain itu, dalam bab ini akan dijelaskan pula gambaran umum wilayah studi kasus kecamatan (Kecamatan Muaragembong, Kecamatan Cikarang Barat, Kecamatan Cibarusah) yang meliputi gambaran karakteristik geografis, karakteristik sosial kependudukan, karakteristik perekonomian wilayah, dan karakteristik sarana dan prasarana.

BAB IV ANALISIS DAMPAK PERTUMBUHAN INDUSTRI TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Bab ini akan menjabarkan tentang analisis dampak pertumbuhan industri terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bekasi baik secara makro maupun mikro. Secara makro, analisis akan dilakukan dengan analisis regresi linier berganda antara variabel pertumbuhan industri (jumlah industri, nilai investasi, nilai ekspor, PDRB sektor industri, dan tenaga kerja industri) dan variabel kesejahteraan (tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan tingkat pembangunan manusia). Selain itu, secara mikro analisis akan membahas dampak pertumbuhan industri terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Muaragembong, Kecamatan Cikarang Barat, dan Kecamatan Cibarusah.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Bab ini berisikan temuan studi, kesimpulan dari hasil studi yang dilakukan serta rekomendasi yang dapat diberikan, kelemahan studi, dan saran studi lanjutan.